

KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM MENGATASIMASALAH PERBATASAN DI MOTAIN TIMOR LESTEDENGAN INDONESIA

Oleh: DIANA FILIPE XIMENES (06260068)

International Relation

Dibuat: 2010-06-15 , dengan 6 file(s).

Keywords: PEMERINTAH TIMOR LESTE

ABSTRAKSI

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan hal utama yang harus dijaga secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat agar tetap tercipta aman dan terhindar dari segala ancaman baik secara eksternal maupun internal.

Wilayah perbatasan Timor Leste dengan Indonesia merupakan salah satu daerah Teritorial yang bersifat strategis dan sering terjadi kerawanan. Kebijakan pemerintah Timor Leste dalam mengatasi masalah perbatasan Timor Leste dengan Indonesia untuk menciptakan stabilitas keamanan bagi kedua negara, meningkatkan hubungan kerjasama yang baik di bidang pertahanan keamanan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, saling memberi kepercayaan, menegakkan hukum sesuai dengan UUD penjagaan keamanan wilayah perbatasan kedua negara masing-masing, dan menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah perbatasan kedua negara, memegan teguh perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pemerintah kedua negara secara bersama, menunjukan keprofesionalan pemerintah kedua negara.

Mengetahui,

ABSTRACT

The territorial area of a country is the main point that has to be armed maximally by the government and the society itself in order to be peace and out of danger or treat either as externally or internally.

Territorial area of Timor Leste with Indonesia is one of territorial areas that is strategic and it is common to be crime-infested area. The policy of Timor Leste government concerning to solve territorial problems toward Indonesia which is aiming to create safety stability for both countries, to increase good cooperation relationship in the field of security and defense, economic, politic, social and culture, trustworthiness, jurisdictional based on UUD concerning to the surveillance of territorial safety between those countries, froze on to the engagements that have been previously agreed by both governments together, show such professionalism of those two governments.